

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar didunia, dan merupakan adalan utama dalam menghasilkan devisa diberbagai negara. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi diberbagai negara, baik itu di negara berkembang maupun negara maju. Pariwisata sering disebut sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool for regional development, invisible export, non polluting industry*, dll. Salah satu negara berkembang yang mengutamakan pembangunan wilayah yang terencana melalui pariwisata adalah Indonesia, pembangunan berkelanjutan yang terencana dari segi ekonomi, maupun sosial budaya (Pitana, 2005:3-4).

Pembangunan seringkali dikaitkan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam bidang ekonomi dan stabilitas politik. Tetapi bidang sosial budaya dan lingkungan sering kali diabaikan, pada kenyataannya bidang sosial budaya dan lingkungan bisa dijadikan modal pembangunan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi dibidang sosial budaya dan lingkungan yang unggul. Dengan potensi tersebut maka pembangunan berkelanjutan di Indonesia bisa dilaksanakan (Budiman, 2000:1).

Sektor pariwisata merupakan aset yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan suatu negara. Melalui pariwisata terjadi peningkatan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja sehingga pembangunan terlaksana. Sektor pariwisata dipilih sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah (Provinsi dan

Kabupaten), instansi-instansi dibawah Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi lazimnya mempunyai akses yang lebih kuat kepada pemerintah pusat atau badan-badan internasional dan dapat berfungsi sebagai *a vocal organization* untuk mendukung pariwisata tersebut (Usman, 2006:57).

Pariwisata menurut Undang-undang No 10/2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Fasilitas yang disediakan akan menarik para pengunjung untuk melakukan kunjungan dan akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah setempat.

Fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah akan memberikan suatu kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan daerah, yang terlihat dari aspek ekonomi, sosial dan aspek budaya, dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi pariwisata memberikan suatu tambahan devisa negara, aspek sosialnya pariwisata dapat menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah pariwisata tersebut, sedangkan aspek budaya pariwisata bisa menyatukan budaya yang ada di daerah tujuan wisata tersebut serta aspek lingkungan pariwisata dapat melestarikan lingkungan tempat objek wisata tersebut.

Berbagai aspek dipengaruhi oleh pariwisata, sehingga butuh suatu pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat dan menciptakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam melakukan pembangunan disektor pariwisata pemerintah harus bisa menciptakan suatu situasi “Tata tentram kerta raharja”. Dalam situasi yang demikian, masyarakat benar-benar merasakan

adanya kewajiban moral untuk membantu usaha-usaha pemerintah itu sendiri, dengan berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Pratikto, 1979:35).

Aktivitas pariwisata mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ketiga aspek yang menjadi prinsip dalam pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial budaya serta pelestarian lingkungan. Maka dari itu kewajiban moral masyarakat untuk membantu usaha pemerintah dalam mengembangkan pariwisata sangat dibutuhkan karena pariwisata merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, dan kebudayaan. Pada awalnya tujuan pengembangan pariwisata dipandang sebagai kegiatan ekonomi dan tujuan utamanya untuk mendapatkan ekonomi, baik masyarakat maupun daerah, tapi saat ini pariwisata juga merupakan kegiatan sosial budaya pada masyarakat banyak (Pitana, 2005:33).

Perkembangan pariwisata juga harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pariwisata yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatawan serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal begitu juga dengan pengelolaan pariwisata yang baik akan memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan daerah (Pitana, 2009:81).

Sistem pengelolaan pariwisata yang terjadi dua arah tersebut tidak terlepas dari aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem tersebut. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: masyarakat, swasta dan pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada

destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, serta tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha sedangkan dalam kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, daerah dan instansi-instansi yang ada dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Pitana, 2005:96-97).

Aktor yang menggerakkan pariwisata tersebut akan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran masing-masing. Apabila ketiga aktor yang menggerakkan sistem pengelolaan pariwisata ini berperan dan melakukan proses sosial yang bersifat asosiatif atau kerja sama dengan baik maka akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan yang diharapkan oleh setiap elemen yang ada, tetapi apabila tidak berperan sesuai dengan peran yang ada maka akan terjadi ketimpangan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pembangunan daerahnya memprioritaskan sektor pariwisata. Pariwisata di daerah ini memberikan kontribusi pendapatan bagi daerahnya untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan dan minyak bumi sangat minim serta objek pariwisata juga beragam.

Salah satu daerah pariwisata di Sumatera Barat yang memiliki potensi pariwisata adalah daerah Kabupaten Agam.

Tabel 1.1
Potensi Objek Wisata Berdasarkan Jenis Wisata di Kabupaten Agam

Wisata Alam	Wisata Sejarah dan Budaya	Wisata Bahari
Danau Maninjau	Museum Buya Hamka	Bandar Mutiara/ Pantai Tiku
Puncak Lawang	Front Palupuah	Pulau Ujung
Ngarai Sianok	Monument Tuangku Nan Renceh	Pulau Tapi
Embun Pagi/ Ambum Tanai	Taman Makam Pahlawan Siti Manggopoh	Pantai Ujung Karang
Kelok 44	XIII Nan Basa	Pemandian Alam dan Mecusuar Sungai Tanang
Ngalau Baso	-	-
Ngalau Simarasok	-	-
Air Terjun dan Pemandian Gadih Ranti	-	-
Ekowisata Lasi	-	-
Telaga Anggrek	-	-
Ngalau Kemang	-	-
Ngalau Terang	-	-
Bunga Raflesia	-	-
Taman Wisata Muko-Muko	-	-
Taman Raya Balingka	-	-
Gunung Marapi	-	-
Air Terjun Badorai	-	-
Aia Tigo Raso	-	-
Sungai Janiah	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Agam 2014

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa Kabupaten Agam memiliki Potensi pariwisata yang merupakan aktivitas ekonomi sosial dan budaya serta pelestarian lingkungan. Beragam potensi tersebut dijadikan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pengelolaan pariwisata yang baik dan cermat. Baik dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata bahari.

Potensi Wisata alam Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam merupakan salah satu potensi wisata dengan pemandangan alam yang indah. Apalagi dengan melihat letak yang strategis dari ke 9 nagari yang dikelilingi oleh Danau Maninjau. Semakin takjub akan keindahan alam dan budaya dari tiap-tiap nagari, memancing serta bertualang dengan sepeda mengelilingi danau, khususnya destinasi air, yang bisa dinikmati untuk memancing, mandi-mandi dan berenang dibibir Danau Maninjau.

Disekitar danau ini juga terdapat penginapan berupa *homestay*, hotel, dan café yang ada diperbukitan sekitar danau. Serta wisatawan juga dapat menikmati berbagai masakan dan makanan khas masyarakat Maninjau seperti Palai Rinuak, Bada Salai, Ikan Bakar, Pensi yang tidak terdapat di daerah lain. Namun, kini semenjak *boomingnya* keramba jala apung di Danau Maninjau yang hampir mencapai 20.000 unit mengakibatkan kondisi air danau menjadi hijau dan berbau.

Tabel 1.2
Jumlah Keramba Jaring Apung Danau Maninjau

Tahun	Keramba Jaring Apung (Petak)
2008	16.425
2009	9.950
2010	10.415
2011	12.686
2012	14.347
2013	16.431
2014	18.624
2015	23.566

Sumber: Agam dalam angka 2016

Dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwa dalam mengembangkan usaha keramba jaring apung, masyarakat Maninjau yang bekerja sebagai petani ikan dan pembudidaya ikan keramba mengembangkan jumlah keramba jaring apung dengan intennya dan setiap tahunnya jumlah keramba jaring apung mengalami peningkatan melalui proses sosial disasosiatif yang bersifat kompetisi atau persaingan bagi setiap petani keramba jaring apung. Persaingan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan untung yang banyak, tanpa melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan. Dari tabel diatas terdapat penurunan jumlah petak keramba jaring apung dari tahun 2008 ke tahun 2009 menurut Badan Pengelola Kelestarian Danau Maninjau (BPKDM) yang disebabkan oleh kematian ikan secara massal yang mencapai 130 Ton.

Keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat terhadap keberadaan keramba ikan jaring apung, tanpa memperhatikan lingkungan dan kualitas air Danau Maninjau. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan Danau Maninjau yaitu terjadi degradasi ekologi danau karena eksploitasi sumberdaya alam danau

yang secara berlebihan, serta menyebabkan penurunan ekosistem danau yang berdampak pada kematian ikan secara masal dan terjadi penurunan pemanfaatan air danau untuk pariwisata (Farissa, 2015:4)

Badan Pengelola Kelestarian Danau Maninjau (BPKDM) merilis ikan yang mati di Danau Maninjau mencapai 130 ton. Kematian ikan disebabkan oleh masuknya mikroskopis yang mengambang di permukaan air ke insang ikan di dalam keramba. Mikroskopis tersebut dipicu dari nitrogen dan fosfor dari sisa pakan yang telah banyak menumpuk di dasar danau. Timbulnya mikroskopis ini dipicu musim angin dan penghujan yang mengakibatkan *booming* mikroskopis masuk ke insang menjadikan insang ikan berlendir sehingga membuat ikan sulit bernapas. Air danau pun berubah warna menjadi hijau lumut, akibat berkembangnya sejenis *plankton* dalam air danau (Kompasiana.com, Juni 2015)

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam mengakui jika pencemaran air Danau Maninjau menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan pariwisata pada wilayah tersebut. Keindahan Danau Maninjau saat ini hanya bisa dinikmati dari atas. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Agam sangat serius untuk menyelamatkan Danau Maninjau dengan cara menekan, serta mengurangi jumlah keramba secara bertahap. Selain itu, pemerintah akan terus berupaya menciptakan beragam kegiatan yang merangsang pertumbuhan ekonomi pada tingkat masyarakat dari sektor kepariwisataan (Antara News, diakses 20 November 2015).

Tabel 1.3
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Agam dari Tahun 2008-2015

Tahun	Data Kunjungan	
	Nusantara	Mancanegara
2008	69.895	7.848
2009	51.311	6.630
2010	154.891	19.231
2011	187.204	11.668
2012	252.510	19.006
2013	308.748	20.733
2014	413.977	29.721
2015	455.087	30.923

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Agam dalam angka 2015

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah wisatawan ke Kabupaten Agam dari tahun 2008 ke tahun 2009 baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Menurut Badan Pengelola Kelestarian Danau Maninjau (BPKDM) penurunan jumlah wisatawan tersebut disebabkan oleh kematian ikan secara massal di Danau Maninjau yang mencapai 130 Ton, dengan kondisi danau yang tercemar akibat bangkai ikan yang mati mengapung dipermukaan danau mengakibatkan jumlah kunjungan ke Danau Maninjau menurun dan mempengaruhi jumlah kunjungan ke Kabupaten Agam. Kematian ikan secara massal pada tahun 2009 ini merupakan jumlah terbanyak untuk kematian ikan sampai tahun 2014.

Hal tersebut juga menggambarkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan untuk tahun-tahun berikutnya. Data tersebut tidak hanya kunjungan ke Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, namun mencatat kunjungan ke Kabupaten Agam yang kunjungan wisatawan tersebar keseluruh tempat objek wisata yang ada seperti Puncak Lawang, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya dan lainnya. Untuk Kunjungan wisatawan ke Danau Maninjau terjadi penurunan kunjungan dan sepiunya tingkat hunian hotel dan penginapan. Rajo Bintang selaku pemilik Hotel Maninjau Indah menuturkan bahwa bau tidak sedap dan bau amis yang menyengat karena bangkai ikan yang mengapung dipermukaan danau membuat kunjungan ke hotelnya berkurang sekitar 10% (Antara News, diakses 25 Januari 2016).

Kondisi ini mengakibatkan tidak ada lagi wisatawan mandi-mandi di Danau Maninjau. Jangankan untuk mandi, mencuci tangan pun wisatawan enggan di danau. Pengusaha penginapanpun, seperti hotel dan *home stay* dan *restourant* semakin lengang. Dulunya Danau Maninjau banyak pengunjung yang datang dan mandi, namun pada saat ini hanya tampak keindahannya saja dari Puncak Lawang dan sepi pengunjung (Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2016).

Hal ini terlihat dari rusaknya Danau Maninjau akibat aktivitas keramba jaring apung yang jumlahnya selalu meningkat. Serta aktivitas keramba jaring apung tersebut juga tidak sebanding dengan aktivitas pariwisata karena kriteria pembangunan berkelanjutan menurut Kementrian Lingkungan Hidup adalah tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya, tidak adanya pemborosan penggunaan

sumber daya alam dan *depletion of natural resources*, serta kegiatan harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Kondisi danau yang demikian mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pencapaian tujuan dan kriteria dari pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Salim, 1993:4).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam salah satunya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, tetapi belum mengatur secara keseluruhan serta penerapan sanksi bagi pelanggarnya. Pada kenyataannya peraturan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat sekitar Danau Maninjau karena masyarakat beranggapan jika keramba jaring apung yang menjadi mata pencaharian utama mereka dikurangi maka akan terjadi suatu penurunan pendapatan dan masyarakat akan kehilangan sumber pendapatan.

Pemerintah selaku regulator harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata ini akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi dan dampak lingkungan sekecil mungkin untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan. Dengan demikian perlu adanya upaya Pemerintah Kabupaten Agam khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta *stakeholder* untuk meningkatkan kembali potensi

pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung. Agar ketimpangan sosial ekonomi dan lingkungan bisa diminimalisir dengan adanya perkembangan pariwisata Danau Maninjau yang lebih baik dan melibatkan pemerintah, *stakeholder*, masyarakat, dan pelaku wisata untuk pengelolaan pariwisata tersebut, karena tanpa penanganan yang menyeluruh dan melibatkan banyak aktor instansi-instansi yang berhubungan dengan sektor pariwisata, sangat sulit untuk menciptakan pelayanan dan pengembangan pariwisata yang mendatangkan kepuasan kepada setiap masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

Adanya degradasi air danau akibat tubo belerang dan pencemaran air danau akibat jumlah keramba jaring apung yang tiap tahun mengalami peningkatan, sehingga wisatawan baik domestik maupun mancanegara tidak bisa memanfaatkan air danau untuk mandi, berenang dan aktifitas wisata air lainnya. Pemerintah Kabupaten Agam telah mengeluarkan Peraturan Daerah terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau namun belum secara keseluruhan menerapkan sanksi dan upaya lanjutan untuk keseimbangan antara ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dalam pelestarian danau. Dengan demikian diperlukan suatu upaya pemerintah Kabupaten Agam khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta *stakeholder* dalam meningkatkan potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung tersebut, agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial ekonomi dan

lingkungan dapat terlaksana. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka fokus masalah penelitian adalah ***“Prospek Pengembangan Pariwisata Danau Maninjau Saat Berkembangnya Keramba Jaring Apung”***.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum:

Mendeskripsikan prospek pengembangan pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung.

2. Tujuan Khusus:

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam beserta *stakeholder* untuk meningkatkan kembali pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta *stakeholder* dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dibidang sosiologi pembangunan dan bidang pariwisata. Serta sumbangan akademis yang berhubungan dengan pemecahan masalah dalam sosiologi pembangunan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah terkait dan masyarakat sekitar Danau Maninjau sehingga bisa meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau dan dapat mengurangi pencemaran danau lewat pelestarian ekosistem danau yang berkelanjutan.
2. Hasil penelitian bisa menjadi pemecahan masalah untuk semua pihak dalam proses peningkatan potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pariwisata

Terdapat beberapa pengertian pariwisata yang dikemukakan oleh para ahli. Seorang ilmuwan pariwisata yang terkenal, Prof Hunziker dan Prof. Kraph mendefinisikan pariwisata sebagai sejumlah hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang-orang asing diluar tempat tinggal dalam waktu tidak lama (sementara) selama mereka tidak melakukan kegiatan ekonomis atau bekerja. Sedangkan Sunardi Joyosuharto mengatakan bahwa pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhannya (Yoety, 1983:103)

Menurut Undang-undang No 10/2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Fasilitas yang disediakan akan menarik para

pengunjung untuk melakukan kunjungan dan akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah setempat.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu minimal 24 jam dan maksimal lamanya 3 bulan didalam suatu negeri yang bukan merupakan tempat tinggalnya. Pengertian ini dikaitkan dengan subjek pariwisata adalah wisatawan. Wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan kepariwisataan (Wiwaho, 1990:24).

Dari beberapa pengertian pariwisata diatas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan orang atau wisatawan, menuju suatu tempat (objek wisata) dengan tujuan menikmati dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam jangka waktu yang tidak lama (sementara). Kegiatan sementara ini hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesaat saja tidak menjadikan kegiatan itu sebagai rutinitas, kegiatan ini dilakukan juga karena adanya daya tarik tersendiri bagi daerah tersebut sehingga orang mengunjungi wilayah tersebut.

Pariwisata merupakan suatu aspek yang diintegrasikan dengan pembangunan berkelanjutan, sehingga pariwisata juga dikelola berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya alam yang dibutuhkan untuk pembangunan masa yang akan datang (Suwena, 2010:279).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya pada ekologi dan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan pada kebudayaan karena kebudayaan juga

menjadi sumber penting dalam pembangunan berkelanjutan. Suatu kegiatan wisata dianggap berkelanjutan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat.
2. Mengacu kepada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa ada konflik sosial.
3. Masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda.
4. Menguntungkan dari segi ekonomi, yaitu keuntungan yang didapati dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suwena, 2010:279).

Dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan menekankan bahwa pariwisata harus didasari kriteria yang berkelanjutan yang intinya adalah bahwa pembangunan ekologi jangka panjang harus didukung dan pariwisata harus layak secara ekonomi serta adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat lokal (Indrawati, 2010:122).

Pencapaian pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan dibutuhkan dua pendekatan dalam keterkaitan pariwisata yaitu, keterkaitan horizontal dan vertikal. Dalam keterkaitan horizontal pendekatan ini mengandung pengertian bahwa kepariwisataan merupakan fasilitator terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dan memerlukan suatu kolektifitas dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan dalam keterkaitan vertikal tujuannya untuk mencari keseimbangan penggabungan komponen-komponen penting dari aktivitas

kepariwisataan dan pembangunan serta melindungi berbagai terobosan cemerlang dalam pengambilan keputusan (Abdilah, 2001:87).

1.5.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Salim, 1993:4).

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu :

- (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*.
- (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya.
- (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup (Kurniawati, 2010:26).

1.5.3 Perspektif Sosiologis

Dalam penelitian yang berjudul upaya pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung dapat ditinjau dengan perspektif sosiologis yang dijelaskan oleh Giddens dalam teori strukturasi. Dalam teori strukturasi tersebut dijelaskan hubungan antara pelaku (tindakan) dengan struktur berupa relasi dualitas, bukan dualisme.

Dualitas itu terjadi dalam “praktik sosial (*social practices*) yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu”. Praktik ini yang seharusnya menjadi objek utama kajian ilmu-ilmu sosial. Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik diberbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan yang dilakukan. Struktur dalam gagasan Giddens juga bersifat memberdayakan (*enabling*) yang memungkinkan terjadinya praktik sosial (Priyono, 2002:22)

Dari berbagai prinsip struktural, Giddens terutama melihat tiga gugus besar struktur, yaitu:

1. Struktur penandaan atau signifikansi (*signification*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana.
2. Struktur penguasaan atau dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi).
3. Struktur pembenaran atau legitimasi (*legitimation*) yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum.

Teori strukturasi yang dijelaskan oleh Giddens memfokuskan perhatian pada *social-practices*, yang menghubungkan antara sosiologi makro dengan sosiologi mikro, melalui hubungan antara *agency* dan “struktur”. *Agency* dan struktur ada dalam hubungan dualitas dan saling mempengaruhi, dan bukan dualisme. Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Semua *social action* melibatkan *social actor*, dan keduanya begitu terkait erat dalam aktivitas atas *practice* manusia secara berkelanjutan (Pitana, 2005:26).

Manusia (*actor, agent*) selalu terlibat dalam praktis dan melalui praktis tersebut diproduksi kesadaran atau reflektivitas struktur. Struktur selalu diproduksi oleh sekumpulan praktis yang diaturnya. Secara singkat, teori strukturasi Giddens mempunyai pandangan sebagai berikut:

1. Agen (aktor) selalu memantau pikirannya, aktivitasnya, maupun lingkungan fisik dan sosialnya.
2. Aktor mensosialisasikan dunianya, sehingga memberikan rasa aman dan dapat bertindak efektif dalam kehidupan sosialnya.
3. Perilaku aktor selalu didorong oleh motivasi-motivasi tertentu walaupun motivasi tersebut acapkali tidak disadari.
4. Kesadaran (*refleksivitas*) aktor ada yang bersifat diskursif (dapat dijelaskan dengan kata-kata), ada juga yang praktis (tidak dapat dijelaskan).
5. *Agency* adalah apa yang dilakukan oleh agen, walaupun tidak dikatakan.

6. Struktur adalah piranti (*rules and resources*), yang hanya ada karena adanya aktivitas agen yang terus-menerus (jadi berbeda dengan strukturalisme yang memandang struktur sebagai kekuatan yang dapat memaksa aktor).

7. Struktur pada saat yang sama selalu *constraining and enabling* (membatasi sekaligus mendorong) aktivitas agent. Struktur adalah media sekaligus hasil dari praktis.

Giddens mengatakan, “Setiap riset dalam ilmu sosial atau sejarah selalu menyangkut penghubungan tindakan (seringkali disinonimkan dengan agen dan struktur. Namun dalam hal ini tak berarti bahwa struktur ‘menentukan’ tindakan atau sebaliknya” (Ritzer, 2010:507).

Teori Strukturasi Giddens yang memusatkan perhatian pada praktik sosial yang berulang itu pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Menurut Giddens, agen dan struktur adalah dwi rangkap, dalam artian seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia. Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika di mana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan. Serta menjelaskan masalah agen-struktur secara historis, prosessual, dan dinamis (Ritzer, 2010:508).

Berdasarkan uraian teori strukturasi yang dijelaskan oleh Giddens, maka penelitian yang mendeskripsikan prospek pengembangan pariwisata Danau

Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung dibutuhkan suatu agen atau aktor yang memperhatikan dan memantau aktivitas dan lingkungan fisik maupun sosial. Serta harus memperhatikan struktur yang sebagai piranti (*rules and resources*) yang dalam penelitian ini *rules* adalah suatu aturan atau normatif yang menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, sedangkan *resources* adalah potensi pariwisata Danau Maninjau yang ada dan dijadikan suatu alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Kesimpulan utama yang dapat diambil dari penjelasan teori strukturasi Giddens tersebut adalah dibutuhkan suatu tindakan aktor sebagai agen dalam memperhatikan keseimbangan antara aktivitas dengan lingkungan fisik dan sosial. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada tindakan Pemerintah Kabupaten Agam khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung.

1.5.4 Penelitian Relevan

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia (2003) tentang “usaha dan kendala pariwisata di Nagari Maninjau setelah krisis moneter” menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi saat itu pada bidang pariwisata berdampak pada penurunan jumlah wisatawan karena pencemaran terhadap danau yang diakibatkan oleh adanya PLTA maninjau, banyaknya jumlah keramba jaring apung dipinggir danau dan musibah tubo belerang, serta minimnya keamanan dan sarana prasarana pendukung bagi wisatawan. Hasil penelitian

tersebut ada beberapa usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pariwisata pasca krisis moneter ini adalah dengan cara, melakukan penyuluhan Sapta Pesona dan promosi pariwisata, mengadakan pertemuan seminar, diskusi, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan sumber daya manusia dibidang pariwisata dapat ditingkatkan, serta untuk mengatasi pencemaran danau dibentuk LSM Forum 12 yang merupakan sekumpulan warga masyarakat ditambah dengan unsur departemen-departemen yang bekerjasama dengan LIPI.

Serta penelitian yang dilakukan oleh Farissa (2015) tentang “upaya petani keramba dalam mengatasi pencemaran Danau Maninjau” menjelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran Danau Maninjau, setelah adanya koordinasi antara *stakeholder* dengan kelompok petani keramba (pembudidaya ikan) yaitu berupa tindakan mengurangi jumlah petak keramba masing-masing individu, mengurangi jumlah penebaran bibit ikan kedalam kolam (keramba) dan mengurangi jumlah pakan yang diberikan, serta berupaya membersihkan danau secara bergotong royong, tapi dari usaha yang dilakukan tersebut terdapat kendala yang dihadapi untuk melakukan upaya mengurangi pencemaran tersebut yaitu, pengetahuan yang berbeda, aturan yang belum kuat, kekhawatiran penurunan pendapatan serta kekhawatiran hilangnya mata pencaharian.

Dari penelitian yang ada ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan, perbedaannya yaitu peneliti lebih menjelaskan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Agam khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta

stakeholder dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung, sehingga ketidakseimbangan antara sosial ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh keramba jaring apung dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan kembali pariwisata Danau Maninjau dan tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Agam yang mengutamakan keseimbangan sosial ekonomi dan lingkungan dapat terlaksana.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga peneliti harus turun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara yang ditujukan kepada subjek penelitian. Pendekatan kualitatif menurut Strauss dan Corbin merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Afrizal, 2014:13).

Pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dengan tidak menganalisis angka-angka. Pendekatan ini dipilih karena pendekatan penelitian kualitatif menjelaskan secara detail bagaimana proses yang sebenarnya dan saling berpengaruh terhadap realitas yang ada. Serta bisa memberikan informasi secara rinci tentang bagaimana keadaan yang sebenarnya.

Sementara itu tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gambaran dan lukisan secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang ada. Dalam menggunakan tipe penelitian deskriptif peneliti mencatat selengkap mungkin mengenai fakta dan pengalaman yang dialami serta menggambarkan dan menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti yaitu upaya Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat keramba jaring apung, serta kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan masyarakat dalam melakukan peningkatan kembali pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung tersebut.

1.6.2 Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif informan menjadi sumber data yang utama dan paling penting. Informan adalah narasumber dalam penelitian yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2003: 206). Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2005:3). Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai prospek pengembangan pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung, maka yang digunakan sebagai informan adalah orang-orang yang berada di perangkat struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam.

Pemilihan informan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan (Moleong, 2005:3). Oleh karena itu, menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan mereka diketahui (Afrizal, 2014:66)

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Orang-orang yang mengetahui perkembangan pariwisata Danau Maninjau.
2. Pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pariwisata Danau Maninjau.

Dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam.
2. Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam.
3. Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam.
4. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam.
5. Seksi Bina Mitra Kepariwisataaan.
6. Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata.
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
8. Seksi Penataan dan Pengembangan Objek Wisata.

9. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Objek Wisata.

10. Seksi Pengembangan Potensi Wisata.

Untuk validasi data digunakan triangulasi dengan informan triangulasi sebagai berikut:

1. Direktur PT. ERO Travel, Ketua DPD ASSITA Sumatera Barat (Pelaku Wisata).
2. Petani Keramba Jaring Apung.
3. Pemilik Homestay.

Informan triangulasi diatas digunakan karena di rasa memiliki pengetahuan serta informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif, dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini selesai. Wawancara dihentikan ketika variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta data atau informasi yang diperoleh sudah menggambarkan pola dari permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 10 orang informan dan 3 orang sebagai informan triangulasi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Informan Penelitian

No	Nama	Umur (Tahun)	Jabatan
1	Rinaldi ST.MT	47	Kabid Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam
2	Ir.Rachmi Diani Putri	48	Kabid Objek dan Sarana Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam
3	Rosva Deswira, S.PI	43	Kabid Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam
4	Elfis Piliang S.PI	47	Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam
5	Evanita	48	Seksi Bina Mitra Kepariwisataaan
6	Fitriati	49	Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata
7	Mertrison S.Sos	48	Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
8	Suherman	56	Seksi Penataan dan Pengembangan Objek Wisata
9	Samsir Alam, SH	56	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Objek Wisata
10	Lem Amar, S.Pd	54	Seksi Pengembangan Potensi Wisata
11	H. Ian Hanafiah	52	Direktur PT.Ero Travel Ketua DPD ASSITA Sumatera Barat
12	Andesweri	42	Petani Keramba Jaring Apung
13	Bob/Ai	45/42	Pemilik Homestay

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang diambil dalam penelitian menjadi alat yang paling penting untuk menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian harus memperhatikan sumber data yang didapat. Sumber data merupakan hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan berbeda dari yang diharapkan. Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang harus dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder (Bungin, 2003: 129).

Adapun jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari informan inti yang menjadi sumber data utama untuk mendapatkan informasi mengenai masalah penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dari suatu instansi terkait (Umar, 2001:42).

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam mendapatkan informasi. informan dalam penelitian ini adalah kepala bidang pengembangan dan kepala bidang sarana dan objek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam, kepala bidang budidaya dan kepala bidang pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam, seksi bina mitra kepariwisataan, seksi pemasaran dan promosi wisata, seksi sarana dan prasarana wisata, seksi penataan dan pengembangan objek wisata, seksi pengembangan dan potensi wisata, dan seksi pengendalian dan pengawasan objek

wisata. Triangulasi data primer dilakukan kepada Ketua DPD ASSITA Sumatera Barat, Pemilik keramba jaring apung, dan pemilik *homestay*

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara mendalam yang keduanya saling mendukung dan melengkapi. Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif maka digunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Observasi

Observasi digunakan sebagai metode utama selain wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Pertimbangan digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang orang katakan, seringkali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Teknik observasi adalah pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan observasi ini kita dapat melihat dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian. Data observasi merupakan data faktual, cermat, dan terperinci tentang keadaan lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis observasi tidak terlibat yaitu peneliti menyampaikan maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti (Ritzer, 1992:74).

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dilakukan pengamatan terhadap suatu gejala sosial dan aktifitas yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Hal yang dilakukan adalah mengamati bagaimana prospek pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung. Dalam kegiatan pengamatan tersebut data yang didapat dicatat secara sistematis. Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam teknik observasi ini adalah panca indra yang digunakan untuk mengamati upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta *stakeholder* serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung.

Observasi atau pengamatan lapangan merupakan suatu kegiatan mengamati bagaimana prospek pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung dan mengamati upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam beserta *stakeholder*. Observasi dilakukan yaitu mengamati objek wisata yang ada disekitar Danau Maninjau, *homestay* dan penginapan serta rumah makan yang ada disekitar Danau Maninjau dan keadaan air Danau Maninjau sebagai destinasi air bagi wisatawan untuk berkunjung. Hasil observasi yang didapat yaitu terjadinya penurunan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara, serta sepi hunian *homestay* dan penginapan yang ada. Pariwisata Danau Maninjau khususnya destinasi air tidak lagi menjadi tujuan wisatawan karena permukaan danau yang telah tertutupi oleh keramba jaring apung dan tercemarnya air danau.

Hasil observasi yang didapat untuk upaya peningkatan pariwisata disaat berkembangnya keramba jaring apung yaitu berupa *event* dan festival Danau Maninjau dan adanya plang-plang yang mempromosikan pariwisata Danau

Maninjau. Kegiatan observasi tersebut didokumentasikan berupa foto-foto dan tulisan untuk tercapainya tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dengan cara bertatap muka langsung dengan informan. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi, maksudnya merekonstruksikan orang-orang, kejadian-kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi dan lain-lain (Moleong, 2005:135). Wawancara untuk penelitian yang bersifat kualitatif ini dilakukan *face to face* atau berhadapan langsung dengan narasumber yang dimintai jawabannya untuk mendapatkan data yang akurat dan teruji kebenarannya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yang dilakukan secara bebas dengan informan yaitu orang yang telah ditentukan untuk menjadi informan.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk mewawancarai informan guna memperoleh data dan informasi mengenai masalah penelitian. Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2003:110). Wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, peneliti telah menyiapkan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat tulis serta perekam suara.

Proses pengumpulan data dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk beraktivitas mengerjakan tugasnya di kantor. Ketika wawancara

berlangsung pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebelum wawancara dengan informan, terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian supaya berjalan dengan lancar.

Wawancara dengan informan diawali dengan menanyakan hal-hal yang umum seperti identitas informan, selanjutnya mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi landasan penelitian sehingga informasi mengenai tujuan penelitian didapatkan dengan jelas dan rinci. Ketika wawancara berlangsung hasil wawancara dicatat dalam bentuk catatan ringkas dan merekam hasil wawancara tersebut. Setelah selesai wawancara, sesampai di rumah hasil wawancara tersebut dilihat dan diperdengarkan kembali dan diperluas dalam bentuk catatan lapangan, catatan lapangan ini dicatat secara detail. Untuk memvalid dan mendalami data maka dilakukan triangulasi kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tanggal 5 Februari 2016 mulai turun ke lapangan yaitu ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam, untuk tahap pertama dilakukan bertemu dengan bapak Ridonal selaku sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di sana peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke kantor tersebut sehingga bapak Ridonal mengatarkan untuk bertemu dengan ibu Fitriati yang menjabat sebagai seksi pemasaran dan promosi wisata, berbincang-bincang dengan ibu Fitriati untuk menyampaikan maksud dan tujuan, ibu Fitriati bersedia menjadi informan dalam penelitian ini tetapi untuk hari ini semua staff di Bidang Pengembangan dan Bidang Sarana dan Objek Wisata ada pekerjaan yang

harus diselesaikan jadi ibu Fitriati menjanjikan untuk bersedia diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2016.

Wawancara dengan informan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak bisa dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016. Peneliti melanjutkan untuk bertemu dengan informan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan hasil bisa bertemu dengan Ibu Rosva selaku kepala Bidang Budidaya dan untuk bertemu dengan Bapak Elfis selaku Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak bisa bertemu karena beliau ada rapat, peneliti dijanjikan untuk bisa bertemu beliau pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016

Pada tahap kedua tanggal 12 Februari 2016 peneliti kembali ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan langsung diarahkan oleh sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam untuk langsung ke ruangan ibu Rahmi selaku Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata. Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan serta ibu Rahmi bersedia di wawancarai. Selanjutnya karena sebahagian staff ada yang keluar daerah dan rapat maka tidak bisa melanjutkan untuk bertemu dengan informan yang lain di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, dijanjikan lagi untuk bisa kembali lagi ke kantor pada tanggal 19 Februari 2016. Oleh karena itu peneliti kembali lagi ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bertemu dengan Kepala Bidang Pengawasan, disana peneliti langsung diantarkan ke ruangan bapak Kabid Pengawasan dan bapak Kabid bersedia diwawancarai.

Pada tahap ketiga tanggal 19 Februari 2016 peneliti kembali ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam, semua informan yang

menjadi sasaran penelitian di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat diwawancarai. Pelaksanaan wawancara dilakukan di ruangan informan bekerja. Kendala yang ditemukan saat melakukan penelitian yaitu kesulitan dalam menyesuaikan jadwal untuk bertemu karena informan sibuk dengan pekerjaan dinas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak ada kendala karena informan sudah paham dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pada tahap keempat tanggal 15 Maret 2016 dilakukan triangulasi data dengan mewawancarai ketua DPD ASSITA Sumatera Barat. Sebelum melakukan wawancara mengenai topik dan tujuan penelitian, terlebih dahulu mengkonfirmasi kesediaan bapak Ian sebagai informan penelitian. Menyampaikan maksud dan tujuan serta mengkonfirmasi waktu untuk penelitian, maka peneliti langsung melakukan wawancara mendalam dan melakukan triangulasi data untuk memvalidasi data yang telah didapatkan sebelumnya.

Tabel 1.5
Teknik Pengumpulan Data

No	Tujuan penelitian	Informan	Data	Teknik
1	Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan kembali pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam - <i>Stakeholder</i> Pariwisata Kabupaten Agam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam beserta <i>Stakeholder</i> dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata saat berkembangnya keramba jaring apung. 	Wawancara mendalam dan Observasi tidak terlibat
2	Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - <i>Stakeholder</i> Pariwisata Kabupaten Agam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam beserta <i>Stakeholder</i> dalam meningkatkan potensi pariwisata saat berkembangnya keramba jaring apung. 	Wawancara mendalam dan Observasi tidak terlibat

1.6.5 Unit Analisis

Dalam penelitian unit analisis bertujuan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga, perusahaan, organisasi dan komunitas. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu yaitu orang yang berada di perangkat struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta *stakeholder* pariwisata Kabupaten Agam.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data, supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan. Menurut Moleong analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami (Moleong, 2005:103).

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara analisis data menurut Miles dan Huberman. Analisis data menurut Miles dan Huberman merupakan suatu proses kategorisasi data atau dengan kata lain proses menemukan pola atau tema-tema dan mencari hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data (Afrizal, 2014:180).

Data yang didapat dilapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan, setiap data yang didapat dicatat dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pola atau kategori dan hubungan berbagai konsep yang dibutuhkan. Selanjutnya data

disajikan dalam bentuk hubungan pola atau kategori dan konsep tersebut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan data yang valid. Data yang didapat secara keseluruhan dianalisis secara kualitatif dan dibantu dengan hasil wawancara merujuk pada emik (pandangan informan) dan etik (pandangan peneliti).

Data yang didapatkan di lapangan adalah mengenai upaya pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kembali pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung. Kemudian data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun hasil wawancara yang dicatat pada catatan lapangan, dikumpulkan dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan kemampuan dan interpretasi peneliti dengan dukungan data primer dan data sekunder serta berdasarkan teori yang dipelajari.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam. Penelitian dilakukan di lokasi ini karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam merupakan pihak yang berwenang untuk mengamati dan mengawasi perkembangan pariwisata di Kabupaten Agam salah satunya pariwisata Danau Maninjau. Dengan demikian untuk melihat upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan pariwisata Danau Maninjau dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh *stakeholder* pariwisata Kabupaten Agam tersebut.

1.6.8. Defenisi Operasional Konsep

1. Upaya

Adalah suatu usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam dalam meningkatkan potensi pariwisata Danau Maninjau.

2. Pariwisata :

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menuju suatu tempat objek wisata.

3. Stakeholder :

Adalah pemangku kepentingan dengan segenap pihak yang terkait dengan masalah peningkatan pariwisata Danau Maninjau.

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

Adalah pihak terkait yang mengarahkan peningkatan dan pengoptimalan pariwisata Danau Maninjau.

5. Keramba Jaring Apung:

Adalah wadah untuk pembudidayaan ikan dengan bahan kerangka kayu, besi, bambu dengan pelampung drum atau bahan lain dengan menggunakan jaring *polyethelene* (PE) dengan ukuran tertentu.

6. Zonasi:

Adalah pembentukan wilayah strategis untuk daerah strategis pariwisata dan daerah strategis keramba jaring apung.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi), untuk lebih jelas ada pada tabel dibawah ini:

Kegiatan	JADWAL PENELITIAN					
	2015	2016				
	DES	JAN	FEB	MAR	APR	JUNI
Seminar Proposal						
Penelitian						
Analisa Data						
Bimbingan Skripsi						
Ujian Skripsi						

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Sejarah Danau Maninjau

Danau Maninjau merupakan salah satu danau yang terletak di Sumatera Barat. Danau ini merupakan danau vulkanis dengan ketinggian 461 mdpl, kedalaman hingga 495 m, dan luas 99 km persegi. Menurut rumor penduduk setempat, danau ini terbentuk karena letusan gunung sitinjau. Tidak heran apabila disekeliling danau terdapat beberapa bukit. Lagenda terbentuknya Danau Maninjau berkaitan erat dengan kisah Bujang Sembilan. Danau terluas ke 11 di Indonesia ini juga pemasok air untuk sungai Batang Sri Antokan.

Asal usul Danau Maninjau yang diawali dari cerita Bujang Sembilan. Bujang Sembilan adalah sebutan yang merujuk pada sembilan laki-laki yang notabene adalah saudara kandung. Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah keluarga yang memiliki sepuluh orang anak, dimana sembilan anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Sembilan orang anak laki-laki tersebutlah yang bernama Bujang Sembilan, dan satu anak perempuan tersebut merupakan anak yang paling bungsu.

Bujang Sembilan mempunyai seorang paman yang bernama Datuak Limbatang. Datuak Limbatang mempunyai seorang putera bernama Giran, dan ia tertarik dengan paras cantik Sani, yang notabene adalah sepupunya sendiri. Akan tetapi Datuak Limbatang tidak melarangnya, justru sebaliknya ia malah mendukung hubungan anak tersebut dan merestui apabila keduanya melanjutkan ke pernikahan. Kukuban, kakak tertua dari Bujang Sembilan tidak setuju dengan

hubungan adiknya dengan Giran. Suatu hari kukuban mempunyai niat tidak baik, ia menyusun sebuah rencana untuk menggagalkan hubungan adiknya dengan sepupunya dengan cara membuat berita fitnah dan menyebarkannya kepada seluruh masyarakat.

Pada saat Sani berjalan berduaan bersama Giran, datanglah Kukuban bersama rombongan warga. Kukuban menuding adiknya sendiri telah melakukan perbuatan asusila bersama Giran. Sehingga Kukuban dan warga menghukum keduanya dengan mengaraknya berjalan keliling desa, dan akhirnya melemparkan Sani dan Giran ke sebuah kawah panah Gunung Sitinjau. Sebelum dilempar ke kawah dalam hati Giran mengucap, “Ya Tuhan jika memang saya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan Kukuban, buatlah Kukuban dan Bujang Sembilan menjadi seekor ikan”. Tepat setelah kedua sejoli ini dilemparkan ke kawah tiba-tiba terjadi fenomena aneh. Gunung Sitinjau yang pada mulanya baik-baik saja tiba-tiba meletus, dan letusan gunung tersebut menciptakan kawah, dan kawah inilah yang disebut dengan Danau Maninjau dengan Bujang Sembilan yang berubah menjadi ikan hidup didalamnya dan nama-nama Bujang Sembilan dijadikan nama wilayah yang ada di sekitaran Danau Maninjau dengan pusat administrasi kecamatan Tanjung Raya.

2.2 Keadaan Wilayah

Letak Danau Maninjau berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Letak geografis Kecamatan Tanjung Raya berada pada $100^{\circ} 05' - 100^{\circ} 16' BT$ sampai $0^{\circ} 12' - 0^{\circ} 25' LS$. Batas wilayah Kecamatan Tanjung Raya yakni:

- Sebelah Utara: Kecamatan Palembang
- Sebelah Selatan: Kecamatan Padang Pariaman
- Sebelah Barat: Kecamatan Lubuk Basung
- Sebelah Timur: Kecamatan Matur

Ketinggian wilayah Kecamatan Tanjung Raya dari permukaan laut adalah 100-1000 m, luas wilayah 244,03 km² dengan jumlah nagari sebanyak 9 nagari dan terdiri dari 53 jorong.

Tabel 2.1
Nagari di Kecamatan Tanjung Raya

Nama Nagari	Luas (Ha)
Tanjung Sani	75.03
Sungai Batang	28.13
Maninjau	25.60
Bayur	30.74
Duo Koto	11.69
Paninjauan	7.03
Koto Kaciak	19.59
Koto Gadang	17.08
Koto Malintang	29.14
Jumlah	244.03

2.3 Jumlah Penduduk

Kecamatan Tanjung Raya memiliki penduduk yang besardan tersebar dari Nagari Maninjau sampai Nagari Tanjung Sani. Untuk jumlah penduduk dan kepadatan penduduk sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tanjung Raya

Nama Nagari	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Tanjung Sani	7.216	146
Sungai Batang	3.427	153
Maninjau	3.000	357
Bayur	5.715	534
Duo Koto	3.025	702
Paninjuan	2.312	377
Koto Kaciak	3.509	219
Koto Gadang	2.130	265
Koto Malintang	3.450	153
Jumlah	33.784	228

2.4 Mata Pencaharian Penduduk

Kecamatan Tanjung Raya merupakan daerah bentuk alam perbukitan dan pantai (tepi Danau Maninjau), maka mata pencaharian utama masyarakat dibidang perikanan, pertanian/perkebunan, peternakan, dan perdagangan/jasa.

2.5 Lembaga-Lembaga yang Ada

Lembaga Nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Raya adalah:

2.5.1 Badan Musyawarah (BAMUS)

Bamus merupakan lembaga pemusyawarahan yang ada di sebuah nagari dan juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam membangun nagari, karena setiap anggota Bamus merupakan perwakilan dari masyarakat.

2.5.2 Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga yang bergerak dalam bidang adat istiadat, anggota KAN merupakan kumpulan dari “*Niniak Mamak, Imam Khatib, dan Cadiak Pandai*” yang ada di nagari tersebut. Nagari Bayur memiliki 44 orang anggota KAN.

2.5.3 Lembaga Pemberdayaan Pembangunan (LPMN)

Lembaga pemberdayaan pembangunan adalah lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pembangunan nagari, segala hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan nagari merupakan tugas dan tanggung jawab dari LPMN, mulai dari mencari sumber dana sampai pada pelaksanaan pembangunan, LPMN bekerjasama dengan Kepala Urusan Pembangunan di Nagari.

2.5.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang kesejahteraan keluarga, lembaga ini diketuai oleh istri Wali Nagari sendiri, kegiatan umum yang dilakukan oleh PKK adalah posyandu, keluarga berencana, kegiatan nagari siaga dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga lainnya.

2.6 Struktur-Struktur yang Ada

Struktur adalah tatanan atau susunan yang membentuk kelompok-kelompok yang terbentuk kedalam suatu kelompok masyarakat. Struktur yang ada membentuk suatu ikatan struktur. Struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk yang tersusun. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, adapula struktur

yang berkaitan dengan sosial. Menurut ilmu sosiologi struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial masyarakat, susunannya bisa vertikal dan horizontal. Penduduk Kecamatan Tanjung Raya yang memiliki mata pencaharian sebagian besar sebagai petani keramba jaring apung, petani, usaha dibidang jasa pariwisata dan lainnya memiliki struktur masing-masing.

Danau Maninjau memiliki banyak potensi baik dari segi ekonomi, sosial, serta lingkungan yang bagus. Potensi tersebut dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar Danau Maninjau. Sebagian masyarakat ada yang memanfaatkan potensi Danau Maninjau ini sebagai mata pencaharian utama ada juga sebagian mata pencaharian tambahan.

Pemanfaatan Danau Maninjau untuk perekonomian terlihat dari aktivitas keramba jaring apung dan bidang jasa pariwisata yang di emban oleh masyarakat tersebut. Namun sejak berkembangnya keramba jaring apung terjadi peningkatan aktivitas masyarakat dan eksploitasi pemanfaatan danau yang dilakukan oleh petani keramba jaring apung yang berdampak pada pencemaran danau. Peningkatan jumlah keramba jaring apung pada tahun 2015 sudah mencapai 23.566 petak, sedangkan daya tampung Danau Maninjau untuk kapasitas keramba jaring apung hanyalah 6.000 petak yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan danau. Adapun struktur tersebut berupa:

2.6.1 Struktur Petani Keramba Jaring Apung

**Individu/ Pemilik
Keramba Jaring
Apung**

Kelompok Pembudidaya KJA

Dinas Kelautan dan Perikanan

2.6.2 Struktur Pemilik Usaha Jasa Pariwisata

**Pemilik Usaha Jasa
Pariwisata**

**Persatuan Usaha Jasa Pariwisata
(Persatuan Hotel dan Restourant)**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB III

PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA DANAU MANINJAU SAAT BERKEMBANGNYA KERAMBA JARING APUNG

3.1. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Beserta *Stakeholder* dalam Meningkatkan Kembali Potensi Pariwisata Danau Maninjau Saat Berkembangnya Keramba Jaring Apung

Danau Maninjau memiliki banyak potensi baik dari segi ekonomi, sosial, serta lingkungan yang bagus. Potensi tersebut dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar Danau Maninjau. Sebagian masyarakat ada yang memanfaatkan potensi Danau Maninjau ini sebagai mata pencaharian utama ada juga sebagian mata pencaharian tambahan.

Pemanfaatan Danau Maninjau untuk perekonomian terlihat dari aktivitas keramba jaring apung dan bidang jasa pariwisata yang di emban oleh masyarakat tersebut. Namun sejak berkembangnya keramba jaring apung terjadi peningkatan aktivitas masyarakat dan eksploitasi pemanfaatan danau yang dilakukan oleh petani keramba jaring apung yang berdampak pada pencemaran danau. Peningkatan jumlah keramba jaring apung pada tahun 2015 sudah mencapai 23.566 petak, sedangkan daya tampung Danau Maninjau untuk kapasitas keramba jaring apung hanyalah 6.000 petak yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan danau. Seperti penuturan ibu Rosva Desvira selaku Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan:

“...Tercemarnya lingkungan danau akibat perkembangan keramba jaring apung saat ini sudah mencapai lebih 20.000 petak sedangkan daya tapung Danau Maninjau untuk KJA 6.000 petak kJA dan kondisi air yang tidak lagi mendukung..”

Tercemarnya danau akibat perkembangan keramba jaring apung yang selalu meningkat dan sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, dengan kondisi ini mempengaruhi terhadap aktivitas pariwisata Danau Maninjau. Aktivitas pariwisata Danau Maninjau mulai menurun. Kondisi danau yang tercemar mengakibatkan terjadi penurunan aktivitas pariwisata dan berdampak pada jumlah wisatawan yang berkunjung untuk destinasi air. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Metrison selaku Seksi Sarana dan Objek Wisata:

“Kondisi Danau Maninjau saat ini kurang menguntungkan untuk pariwisata, prospek pariwisata itu telah menurun sekali karena perkembangan KJA yang begitu pesat. Air danau itu tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk pariwisata sehingga terjadi penurunan jumlah wisatawan ke Danau Maninjau untuk mandi-mandi dan berenang..”.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh ibu Fitriati selaku Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata sebagai berikut:

“Kondisi Danau Maninjau saat ini memprihatinkan karena pengelolaan danau yang tidak baik akibat eksploitasi dan penambahan jumlah KJA yang selalu meningkat serta berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan”.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ian selaku Ketua DPD ASSITA Sumatra Barat sebagai berikut:

“Untuk saat ini pariwisata Danau Maninjau itu sudah kritis. Tidak ada lagi pemanfaatan Danau Maninjau untuk aktivitas pariwisata karena perkembangan keramba jaring apung yang berkembang dengan pesat sejak tahun 2009 yang lalu. Aktivitas pariwisata Danau Maninjau pada tahun 90-an itu sangat menarik untuk mandi-mandi, berenang, serta aktifitas lainnya yang bisa dilakukan di Danau Maninjau yang menjadi destinasi wisata air, namun terjadi penurunan pemanfaatan Danau Maninjau untuk pariwisata karena jumlah keramba jaring apung yang sangat banyak mencapai lebih 20.000 untuk diawal tahun 2016 ini dan ini

akan terus meningkat jika tidak terlaksananya aturan untuk kapasitas KJA di Danau Maninjau, seperti yang telah diatur di Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014. Perkembangan keramba jaring apung yang sangat cepat, mengakibatkan penurunan kualitas air dan pencemaran air Danau Maninjau akibat limbah pakan dan kematian ikan secara massal yang hampir terjadi tiap tahunnya. Kondisi yang seperti ini membuat wisatawan berkurang mengunjungi Danau Maninjau untuk memanfaatkan air sebagai destinasi wisatanya. Jumlah kunjungan yang berkurang tiap tahunnya, mengakibatkan jumlah hunian homestay, penginapan, tempat wisata sekitar Danau Maninjau menjadi sepi, dan juga mengakibatkan pendapatan masyarakat yang bermata pencaharian di bidang jasa pariwisata ini menurun”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi Danau Maninjau saat ini sudah tercemar akibat perkembangan keramba jaring apung yang selalu meningkat. Peningkatan keramba jaring apung ini bahkan sudah melebihi kapasitas daya tampung. Daya tampung keramba jaring apung untuk di Danau Maninjau berdasarkan peraturan yang ada hanya 6.000 petak tapi untuk saat ini sudah melebihi 20.000 petak.

Kondisi pariwisata Danau Maninjau yang menurun berdampak pada perekonomian masyarakat dibidang jasa pariwisata. Melihat kondisi pariwisata yang demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak pemerintah yang mendorong tercapainya keseimbangan dan kemajuan pariwisata perlu melakukan suatu upaya agar apa yang menjadi tujuan dalam pembangunan berkelanjutan dari sektor pariwisata dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring yaitu:

3.1.1. Mensosialisasikan Peraturan yang Telah Ada

Peraturan untuk pengelolaan Danau Maninjau yang baik telah banyak tertuang dalam berbagai peraturan, baik itu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta hasil riset LIPI dan BPLH yang menjelaskan Danau Maninjau dalam keadaan terkontaminasi. Peraturan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik jika peraturan tersebut tidak diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pihak pemerintah yang mengayomi permasalahan kebudayaan dan pariwisata maka sebagai aktor dalam struktur pemerintahan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kembali pariwisata Danau Maninjau.

Upaya yang dilakukan yaitu mensosialisasikan peraturan yang telah ada, berikut ungkapan bapak Rinaldi selaku Kepala Bidang Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam sebagai berikut:

“Telah banyak upaya yang dilakukan, yang didasari dari terbitnya Peraturan Daerah yang baru tahun 2014 yaitu adanya peraturan tentang pengelolaan danau yang baik mulai dari peraturan daerah, peraturan bupati, serta kerja sama dengan LIPI dan BPLH untuk memotret bagaimana keadaan air Danau Maninjau saat ini, sehingga pariwisata Danau Maninjau untuk destinasi air meningkat”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Elfis selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam sebagai berikut:

“...telah banyak upaya yang dilakukan mulai dari mensosialisasikan aturan yang ada tentang bagaimana pengelolaan danau sehingga semua pihak mendapatkan informasi mengenai peraturan yang telah ada namun aturan ini belum secara maksimal menjelaskan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar aturan untuk aktivitas keramba jaring apung”.

Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (aktor) dalam meningkatkan pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung yaitu mensosialisasikan peraturan (struktur) yang ada kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Peraturan yang ada sudah disosialisasikan dan sudah diterapkan praktisnya secara baik (*enabling*) tentang bagaimana pengelolaan Danau Maninjau tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan Danau Maninjau yang baik ini akan berdampak perubahan kondisi Danau Maninjau dan semua pihak bisa menerima peraturan yang ada serta tidak terjadinya suatu ketimpangan (*constraining*) dari berbagai pihak dalam pencapaian tujuan tersebut.

Upaya mensosialisasikan dan menerapkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak yang bertanggung jawab untuk perkembangan pariwisata dan salah satu pihak yang mendorong pengelolaan Danau Maninjau ke arah yang lebih baik telah mulai mensosialisasikan peraturan tersebut sejak tahun 2014 awal lahirnya peraturan tersebut.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Danau Maninjau berisikan tentang bagaimana kondisi Danau Maninjau saat ini, menjelaskan aturan untuk daya tampung keramba jaring apung serta bagaimana mewujudkan kawasan danau yang bersih, lestari, berbudaya dan berkelanjutan. Peraturan ini telah

disosialisasikan secara baik kepada petani keramba jaring apung, masyarakat sekitar Danau Maninjau, pemilik hotel, penginapan dan rumah makan yang ada disekitar Danau Maninjau, masyarakat sekitar danau serta pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok sadar wisata Danau Maninjau. Kelompok sadar wisata Danau Maninjau ini terdiri dari Persatuan Hotel dan *Resourant* Indonesia (PHRI), yang beranggotakan pemilik hotel, cafe, penginapan, usaha kuliner khas Danau Maninjau serta Asosiasi Seluruh Travel *Agent* (ASSITA) yang ada di Kabupaten Agam dan Sumatra Barat.

Upaya mensosialisasikan dan menerapkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung. Adanya upaya untuk mensosialisasikan aturan ini agar semua pihak mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai peraturan tentang pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau saat ini serta apa yang menjadi tujuan dalam pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan semestinya. Namun aturan tersebut belum secara maksimal mengatur sanksi yang tegas untuk pihak yang melanggar kapasitas keramba jaring apung.

3.1.2. Mengadakan Penyuluhan untuk Membentuk Kelompok Sadar Wisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan upaya dalam meningkatkan pariwisata Danau Maninjau dengan melakukan penyuluhan untuk membentuk kelompok sadar wisata dengan menerapkan sapta pesona Kabupaten Agam. Sapta pesona Kabupaten Agam yang berisikan aman, tertib, sejuk, indah, ramah tamah

dan ketenagan. Adanya kegiatan penyuluhan untuk membentuk kelompok sadar wisata ini menjadi upaya untuk menggerakkan hati nurani semua pihak untuk meningkatkan pariwisata Danau Maninjau yang mulai menurun akibat keberadaan keramba jaring apung yang sudah melebihi daya tampung kapasitas Danau Maninjau.

Kelompok sadar wisata merupakan kelompok yang tergabung kedalam persatuan hotel, restaurant, rumah makan, penginapan, café dan seluruh persatuan *travel agent* yang ada di Kabupaten Agam dan Sumatra Barat. Kelompok sadar wisata akan memberikan suatu kontribusi dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung lewat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Metrison selaku Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sebagai berikut:

“...membentuk kelompok sadar wisata sehingga dengan adanya kelompok ini terjadi pemberdayaan terhadap SDM yang ada serta kesadaran akan wisata ini dapat terbentuk dalam tiap-tiap diri masyarakat. Selanjutnya penyuluhan akan mengurangi KJA dengan membuat KJA ramah lingkungan sehingga potensi Danau Maninjau bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat banyak”

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Rinaldi selaku Kepala Bidang Pengembangan sebagai berikut:

“...agar terbentuk kelompok sadar wisata serta memiliki rasa cinta wisata yang tinggi karena bisa melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang”.

Berdasarkan uraian diatas upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah mengadakan penyuluhan dan membentuk kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini dibentuk agar masyarakat sekitar Danau

Maninjau memiliki kesadaran yang tinggi dalam meningkatkan potensi pariwisata Danau Maninjau yang menurun akibat berkembangnya keramba jaring apung. Dengan terbentuknya kelompok sadar wisata ini diharapkan tergalinya sumber daya manusia yang lebih tinggi untuk mengembangkan pariwisata Danau Maninjau untuk saat ini dan kedepannya.

Penyuluhan untuk membentuk kelompok sadar wisata yang akan menciptakan sumber daya manusia yang cinta wisata untuk melestarikan kawasan Danau Maninjau untuk generasi mendatang. Penyuluhan tersebut berisikan tentang pelestarian danau lewat pengembangan keramba jaring apung yang ramah lingkungan, dan nantinya kelompok sadar wisata inilah yang menjadi aktor untuk memberikan penyuluhan kepada para petani keramba jaring apung agar bisa menciptakan keramba jaring apung yang ramah lingkungan.

Pembentukan kelompok sadar wisata dibentuk agar dapat memberikan penyuluhan dan kesadaran untuk sadar dan cinta wisata kepada semua pihak yang ada. (masyarakat, pemerintah, dan pelaku wisata) agar dapat meningkatkan pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung. Penyuluhan kepada masyarakat khususnya petani keramba jaring apung dilakukan suatu upaya sosialisasi untuk dapat mengurangi limbah keramba jaring apung yang ada saat ini dibuatlah suatu keramba jaring apung yang ramah lingkungan dan keramba sistem dua jaring. Keramba ramah lingkungan ini menjadi suatu langkah yang paling penting bagi Dinas Kelautan dan Perikanan agar dapat menekan jumlah dan limbah dari keramba jaring apung yang ada saat ini.

Pada tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi terkait dalam mengawasi perkembangan keramba jaring apung telah memberikan bantuan keramba jaring apung yang ramah lingkungan kepada petani keramba jaring apung. Keramba jaring apung ramah lingkungan tersebut terbuat dari bahan *fyber* (tidak besi dan tidak kayu) yang tahan hingga 20 tahun. Tindakan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang terkait dengan kegiatan usaha keramba jaring apung ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara nyata berdasarkan kesadaran yang dimiliki oleh dinas selaku instansi yang bertanggung jawab untuk perkembangan keramba jaring apung.

Hal mengenai keramba jaring apung ramah lingkungan ini juga telah diatur oleh Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2009, dalam pasal 11 ayat 7. Namun pelaksanaan pembauatan keramba jaring apung yang ramah lingkungan ini belum mencapai keseluruhan, untuk nagari yang telah menggunakan keramba jaring apung ramah lingkungan ini ada di Nagari Bayur. Hal ini disebabkan oleh pembuatannya yang memerlukan biaya yang banyak sekitaran 10 juta untuk 1 unit yang berisikan 2 petak keramba jaring apung serta masyarakat belum mengenal secara menyeluruh bagaimana bentuk dan fungsi dari keramba jaring apung ramah lingkungan tersebut.

Dengan demikian peran penyuluh dan kelompok sadar wisata untuk meningkatkan pariwisata Danau Maninjau sangat penting karena dengan tindakan nyata yang dilakukan dapat menciptakan suatu perubahan dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan.

3.1.3. Menjaga Kebersihan Lingkungan Danau Maninjau

Menjaga kebersihan danau dalam bentuk gotong royong ini dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai upaya untuk mengatasi pencemaran danau serta untuk mengurangi terkontaminasinya air dari limbah keramba jaring apung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Elfis selaku Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

“Untuk goro bersama ini telah ada kegiatan GERBANG PENSI yang dilakukan masyarakat salingka danau dan pemerintah untuk membersihkan danau. Tanggapan dan reaksi masyarakat sangat antusias”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Metrison selaku Seksi Sarana dan Prasarana Objek Wisata sebagai berikut:

“Mengurangi pencemaran ini disosialisasikan kepada petani keramba dan masyarakat sekitar danau untuk tidak membuang limbah apa saja kedalam danau agar air tidak terkontaminasi. Terkait dengan mengurangi pencemaran ini kami dari pihak pemerintah dibidang pariwisata sudah menghimbaukan kepada petani keramba yang mengalami musibah tubo belarang maka limbah ikan yang mati itu tidak dibuang begitu saja sehingga nanti ikan-ikan tersebut mengapung dipermukaan dan menghasilkan bau yang menyegat serta kadar minyak dalam air tersebut semakin tinggi dan pencemaran akan lebih sulit di minimalisir. Himbauan kami agar ikan yang mati tersebut di kuburkan sehingga tidak berbau kepermukaan, tapi masyarakat saja sudah panik dengan kerugian yang mereka dapati maka tindakan untuk mengubur bangkai ikan tadi sulit dilakukan oleh petani KJA tersebut. Dan untuk para pengunjung atau wisatawan dalam mengurangi pencemaran ini mungkin tidak membuang limbah apa pun dilokasi wisata, kalau mengunjungi Danau Maninjau biasa nya wisatawan ke PLTA atau muko-muko dihimbaukan untuk membuang sampah pada tempatnya.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh ibu Rahmi selaku Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata sebagai berikut:

“ Kami mensosialisasikan kepada masyarakat agar pencemaran dapat dikurangi maka KJA ramah lingkungan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pencemaran tersebut”.

Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kelautan dan Perikanan adalah menghimbaukan untuk melakukan goro bersama dengan kegiatan yang diberi nama GERBANG PENSI. Serta tindakan untuk mengatasi pencemaran danau dengan cara mengurangi jumlah keramba jaring apung dengan mengganti keramba jaring apung biasa ke keramba jaring apung yang ramah lingkungan.

Menjaga kebersihan danau dalam bentuk gotong royong bersama yang diberi nama GERBANG PENSI (Gerakan Pembangunan dan Penyelamatan Selingkar Danau Maninjau) merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membersihkan danau dan menyelamatkan danau dari pencemaran dan terkontaminasinya air danau yang diakibatkan oleh limbah keramba jaring apung. GERBANG PENSI merupakan program pembangunan yang dicetuskan oleh kelompok Wali Jorong salingka Danau Maninjau. Aksi gotong royong bersama ini melibatkan semua pihak mulai dari kelompok petani keramba jaring apung, Wali Nagari dan Wali Jorong salingka Danau Maninjau, Camat Kecamatan Tanjung Raya hingga Pemerintah Kabupaten Agam dan SKPD terkait.

Kondisi Danau Maninjau yang semakin kritis maka himbuan dan kegiatan gotong royong ini menjadi aksi penting bagi semua lapisan untuk mendukung keberlanjutan program yang dicetuskan oleh kelompok Wali Jorong salingka Danau Maninjau. Kegiatan GERBANG PENSI ini tidak hanya menentukan

program untuk mengatasi pencemaran danau saja namun tujuan dan nilai dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh semua pihak dan generasi mendatang sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Agam bisa terlaksana dengan semestinya.

Himbauan gotong royong untuk mengatasi pencemaran danau tidak hanya kepada petani keramba dan pemilik hotel serta masyarakat sekitar saja, tetapi kepada wisatawan yang berkunjung ke Danau Maninjau juga dihimbau untuk menjaga dan melestarikan kawasan danau dengan cara tidak mencemari danau dengan membuang sampah sembarangan ke danau disaat mengunjungi danau. Untuk petani keramba jaring apung saat terjadi kematian ikan secara massal untuk tidak membuang ikan yang mati ke dalam danau sebaiknya di kuburkan agar tidak menimbulkan bau dan pencemaran yang lebih banyak lagi.

Tindakan membersihkan danau dari limbah didalam danau ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh individu dan kelompok secara sadar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pemerintah struktur kepemimpinan dalam meningkatkan dan mengawasi potensi wisata yang ada telah melakukan tindakan sebagaimana mestinya. Kedua dinas ini telah menjadi aktor dalam menggerakan tujuan dari struktur yang ada tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh GIDDEN dalam teori strukturasinya, bahwa aktor akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam struktur tersebut. Sehingga terjadi keseimbangan dalam mencapai tujuan antara tindakan aktor dengan apa yang menjadi tujuan struktur tersebut. Namun kegiatan tersebut belum

terlaksana secara rutin oleh pemerintah, masyarakat, dan petani keramba jaring apung.

3.1.4. Mempromosikan dan Membina Mitra Wisata

Mempromosikan dan membina mitra wisata yang ada merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti yang diungkapkan oleh ibu Fitriati selaku Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata sebagai berikut:

“Upaya yang kami lakukan yaitu kegiatan promosi berupa plang yang mencirikan objek wisata Danau Maninjau di tepi-tepi jalan, event-event, serta festival Danau Maninjau supaya wisata Danau Maninjau destinasi air bisa lagi ditingkatkan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Elfis Piliang selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

“Kami dari pihak DKP sudah membuat suatu tempat pusat oleh-oleh yang berisi khas Danau Maninjau yang mana tempatnya di muko-muko, disana nanti para pengunjung bisa menikmati kuliner khas Maninjau, semua hasil olahan itu didapat dari petani KJA dan para nelayan, mungkin ini berupa suatu upaya untuk menciptakan hasil olahan sendiri sehingga tidak hanya memproduksi ikan mentah saja. Mungkin nantinya dengan adanya tempat oleh-oleh khas Maninjau ini kami bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata”.

Ungkapan ibu Evanita selaku Seksi Bina Mitra Wisata tentang tindakan membina mitra wisata yang ada sebagai berikut:

“Kami mengadakan workshop dengan pemilik hotel dan restoran serta adakan pertemuan sekali sebulan untuk PHRI yang ada di Maninjau, sehingga dengan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan untuk mempertahankan mitra usaha wisata yang ada dan dengan ini bisa pula meningkatkan kembali potensi wisata Danau Maninjau”.

Berdasarkan uraian diatas tindakan mempromosikan dan membina mitra usaha yang ada merupakan suatu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung khusus untuk destinasi air. Tindakan mempromosikan ini dilakukan dengan mengadakan event-event yang berupa festival Danau Maninjau serta membuat plang-plang ditepi jalan yang berisi mempromosikan Danau Maninjau sebagai tempat objek wisata yang menarik. Selain itu membina mitra usaha wisata seperti usaha jasa dibidang perhotelan, penginapan serta rumah makan yang ada dikawasan Danau Maninjau.

Melalui promosi dan membina mitra wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam tergerak hati masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata. Promosi dan membina mitra wisata yang dilakukan menjadi harapan bagi setiap pihak untuk dapat merasakan kembali pariwisata Danau Maninjau yang terkenal bagi wisatawan domestik dan mancanegara sebelum keramba jaring apung berkembang dengan pesat dan melebihi kapasitas daya tampung Danau Maninjau. Meningkatkan promosi pariwisata menjadi harapan untuk wisatan banyak datang baik domestik dan mancanegara, lama tinggal di Danau Maninjau dengan menikmati layanan penginapan yang baik, suasana yang nyaman, pemandangan yang indah dan berbelanja dilokasi wisata Danau Maninjau.

Sejalan dengan kegiatan mempromosikan dan membina mitra serta menanamkan rasa cinta dan sadar wisata maka kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta *stakeholder* untuk mendukung

meningkatnya pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung mengadakan kegiatan tahunan seperti festival pacu biduk (sampan), festival tambua tansa, kegiatan paralayang fun and fly in Maninjau. Kegiatan fun and fly in Maninjau ini merupakan kegiatan paralayang yang diikuti oleh berbagai negara dan ini menjadi ajang promosi wisata Danau Maninjau ke kancah internasional.

3.1.5. Pembentukan Zonasi Pariwisata dan Keramba Jaring Apung

Pemerintah Kabupaten Agam telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau namun dalam peraturan ini belum ada aturan yang jelas untuk zonasi pariwisata dan zonasi keramba jaring apung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk perkembangan pariwisata disini telah merencanakan suatu aturan tentang zonasi tersebut dalam Rencana Jangka Panjang Kepariwisataaan. Upaya pembentukan zonasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung, seperti yang diungkapkan oleh bapak Metrison selaku Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sebagai berikut:

“Untuk upaya selanjutnya kami telah membuat suatu rencana terkait peningkatan pariwisata Danau Maninjau ini berupa master plan. Upaya ini kami lakukan berdasarkan peraturan pengelolaan danau yang telah ada sehingga untuk rencana yang akan datang akan dibuat suatu zonasi untuk pariwisata dan zonasi untuk KJA mungkin dipertengahan tahun ini semuanya selesai dan kami akan sosialisasikan bagaimana perencanaannya kedepan serta akan dilaksanakan dengan baik”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rahmi selaku Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata sebagai berikut:

“Peraturan akan zonasi akan menjadi upaya dalam master plan kami, jadi tinggal acc dari DPR maka ini akan menjadi acuan untuk melaksanakan pengelolaan danau yang lebih baik sehingga zonasi akan wisata dan KJA dapat ditentukan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Rinaldi selaku Kepala Bidang

Pengembangan Wisata sebagai berikut:

“Kami selalu berupaya untuk mengembangkan objek dan sarana wisata yang ada di Agam salah satunya pariwisata Danau Maninjau sehingga nantinya khususnya destinasi air, sehingga terjadi peningkatan kunjungan dari tahun ke tahun untuk mengunjungi Danau Maninjau khusus destinasi air. Karena dalam RJP juga telah ada bagaimana pembenahan KJA yang baik sehingga tidak tercampur dengan zonasi pariwisata. Tindakan mempromosikan ini kami lakukan berupa awalnya membuat TED, disini ada kawasan pemanfaatan danau dibuatlah zonasi-zonasi untuk pariwisata dan KJA ini akan terealisasi jika DPR telah menyetujui, serta kami akan membuat kawasan strategis Danau Maninjau ini lah yang nantinya menjadi acuan untuk berkembangnya destinasi air setelah mempromosikan TED untuk zonasi dan kawasan strategis telah ada sebelumnya namun masih belum maksimal”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah menjalankan Rencana Jangka Panjang (RJP) kepariwisataan yang telah direncanakan yaitu pembentukan zonasi keramba jaring apung dan zonasi pariwisata, serta apabila di setuju oleh DPR maka aturan untuk zonasi ini akan dilaksanakan. Persetujuan untuk pembentukan zonasi pariwisata dan zonasi untuk keramba jaring apung ini akan mendukung pemerintah dalam meningkatnya potensi pariwisata Danau Maninjau khususnya destinasi air. Serta dengan adanya aturan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mensosialisasikan aturan tersebut kesemua pihak terkait serta diharapkan

juga dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mensosialisasikan ini kepada para petani keramba jaring apung.

Upaya pembentukan zonasi keramba jaring apung dan zonasi pariwisata akan menjadi upaya yang sangat penting karena akan membantu pelaksanaan dalam penerapan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau serta tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan prinsip keseimbangan antara sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dapat terlaksana dengan semestinya. Pembentukan zonasi ini akan terealisasi ketika acc dari DPR telah ada dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi aktor untuk menggerakkan terbentuknya zonasi ini.

Zonasi pariwisata akan dibentuk pada wilayah yang belum didominasi oleh keramba jaring apung dan wilayah yang dekat dengan objek wisata, sedangkan untuk zonasi keramba jaring apung akan dibentuk pada daerah yang jarang penduduk serta jauh dari bibir danau , dan untuk keramba yang berada didaerah padat penduduk akan di pindahkan sesuai dengan kesepakatan pemilik. Pelaksanaan pembentukan zonasi ini akan secara maksimal terealisasi pada tahun 2017 mendatang. Agar terlaksananya secara maksimal zonasi ini maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Dinas Kelautan dan Perikanan beserta *stakeholder* saling bekerjasama dalam kebijakan ini.

3.1.6. Penerapan Peraturan Perizinan Keramba Jaring apung

Perizinan untuk usaha keramba jaring apung harus diatur dengan peraturan yang kuat sehingga keramba jaring apung tersebut tidak berkembang dengan

begitu pesat. Kepemilikan keramba jaring apung di kawasan Danau Maninjau saat ini lebih kepada para investor, masyarakat sekitar Danau Maninjau hanya sebagai pekerja investor tersebut. Keadaan seperti ini membutuhkan suatu aturan yang kuat untuk perizinan usaha keramba jaring apung agar jumlah keramba jaring apung bisa diminimalisir serta pencemaran danau bisa dikurangi dan pariwisata Danau Maninjau khusus destinasi air bisa ditingkatkan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Elfis Piliang selaku Kepala Bidang Pengembangan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

“Kebijakan dan peraturan telah ada bagaimana pengelolaan danau tapi saja aturan untuk perizinan pendirian KJA ini yang belum ada, sehingga sulit untuk menghentikan KJA dengan cepat. Apabila ada aturan akan perizinan dan aturan pajak yang ditetapkan akan jumlah KJA maka mengurangi jumlah KJA sangat cepat dilakukan. Petani keramba akan menentukan jumlah KJA yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi ini kan tidak ada ketegasan akan perizinan tersebut sehingga pihak yang bermodal sebaiknya menambah KJA tiap saat dan masyarakat setempat hanya sebagai pekerja mereka yang memiliki modal, tidak banyak petani keramba itu KJA nya milik pribadi. Agar pariwisata bisa ditingkatkan lagi mungkin kami sebagai pihak DKP akan membuat perencanaan akan aturan yang mengikat untuk izin usaha keramba jaring apung sehingga jumlahnya bisa diminimalkan serta pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan pajak terhadap usaha KJA tersebut, mungkin ini merupakan langkah lanjutan”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rosva Desvira selaku Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

“Adanya aturan untuk perizinan usaha KJA agar jumlahnya bisa dikurangi dan pariwisata bisa lagi ditingkatkan”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung dapat dilakukan dengan adanya peraturan untuk perizinan usaha keramba

jaring apung tersebut. Dengan adanya aturan tentang perizinan tersebut maka jumlah keramba jaring apung dapat dikurangi dan pencemaran dapat diatasi. Sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri dengan adanya perizinan jumlah keramba yang dimiliki ini akan menjadi sumber pendapatan daerah karena izin ada maka petani keramba wajib membayar pajak kepada daerah. Sehingga akan tercipta suatu keseimbangan untuk pendapatan antara usaha jasa pariwisata dan usaha keramba jaring apung.

Keberadaan keramba jaring apung yang selalu meningkat karena belum adanya aturan yang kuat untuk mengatur keberadaan keramba jaring apung dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Danau Maninjau. Aturan yang belum kuat untuk mengurangi jumlah keramba jaring apung tersebut sehingga masyarakat berkompetisi untuk meningkatkan jumlah petak keramba yang dimiliki. Namun telah ada Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tentang izin usaha perikanan tetapi belum ada dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa aktivitas budidaya keramba jaring apung ini menjadi sumber pendapatan bagi daerah Kabupaten Agam karena para pemilik tidak membayarkan pajak atas usaha yang didirikan.

Aktivitas budidaya keramba jaring apung yang ada di sekeliling Danau Maninjau pada umumnya didominasi oleh para investor, anak anagari hanya sebagai pekerja dalam aktivitas budidaya tersebut. Nagari Bayur yang menjadi wilayah terbanyak jumlah keramba jaring apung di Danau Maninjau namun keberadaan keramba jaring apung itu dimiliki oleh para pemilik modal, para pemilik modal secara terus menerus meningkatkan jumlah petak kerambanya tanpa

melihat dampak yang ditimbulkan. Disamping itu para pemilik modal tidak membayarkan pajak atas kepemilikan keramba jaring apung yang mereka miliki. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya aturan yang kuat untuk mengatur perizinan usaha keramba jaring apung.

Dengan adanya upaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuat dan menerapkan aturan yang kuat untuk perizinan keramba jaring apung ini maka jumlah keramba jaring apung di Danau Maninjau dapat dikurangi dan pariwisata Danau Maninjau dapat ditingkatkan. Terlaksananya aturan dan perizinan usaha keramba jaring apung tersebut maka pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Agam dapat berjalan dengan semestinya, serta Pemerintah Daerah mendapatkan pendapatan dari pajak usaha keramba jaring apung dan pariwisata, kehidupan sosial masyarakat sekitar danau bisa ditingkatkan karena usaha keramba jaring apung tidak didominasi lagi oleh pihak yang bermodal dan lingkungan terlestarikan.

3.2. Kendala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Beserta *Stakeholder* dalam Meningkatkan Kembali Potensi Pariwisata Danau Maninjau Saat Berkembangnya Keramba Jaring Apung.

Disetiap melakukan upaya untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pasti ada kendala yang dihadapi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelestarian objek wisata menghadapi beberapa kendala dalam melakukan upaya peningkatan potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung, kendala tersebut berupa:

3.2.1. Terdapat Perbandingan Prospek Pariwisata dengan Prospek Keramba Jaring Apung

Kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung adalah perbandingan prospek pariwisata dan prospek keramba jaring apung saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Suherman selaku Seksi Penataan dan Pengembangan Objek Wisata dan bapak Metrison selaku Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sebagai berikut:

“Kendala yang kami hadapi itu yaa berupa adanya perbandingan prospek KJA dan pariwisata. Karena jika dilihat untuk saat ini dengan perbandingan prospek KJA dan pariwisata jelas pariwisata akan kalah. Hal ini disebabkan oleh KJA yang melihatkan hasil secara langsung terhadap pendapatan masyarakat cukup menanti 3 bulan untuk panen maka akan merasakan pendapatan secara langsung. Sedangkan pariwisata tidak memberikan dampak langsung kepada pendapatan melainkan terhadap lingkungan, pelestarian lingkungan hidup dapat terasakan untuk masa yang akan datang”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Evanita selaku Seksi Bina dan Mitra Wisata sebagai berikut:

“Prospek KJA tadi lah yang menjadi kendala tapi pada umumnya anggota kami yang tergabung dalam kelompok sadar wisata mereka sangat tidak mendukung KJA yang selalu meningkat karena tidak adanya ruang bagi mereka untuk mengenalkan pariwisata lagi”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung adalah perbandingan

prospek pariwisata dengan prospek keramba jaring apung tersebut. Prospek pariwisata memang sangat rendah untuk saat ini jika dibandingkan dengan prospek keramba jaring apung tersebut. Hal ini terlihat dari perkembangan keramba jaring apung yang begitu pesat dibandingkan perkembangan pariwisata.

Prospek pariwisata memang tidak dirasakan secara langsung terhadap perekonomian karena potensi pariwisata lebih ke dalam pelestarian lingkungan, sedangkan keramba jaring apung orientasinya kepada perekonomian masyarakat tidak kepada pelestarian lingkungan danau. Prospek keramba jaring apung dapat dirasakan untuk pendapatan dalam waktu tiga bulan, dan akan berdampak pada pencemaran danau. Sedangkan prospek pariwisata akan sangat lama merasakan dalam orientasi pendapatan tapi untuk pelestarian lingkungan bisa dirasakan untuk sekarang, dan masa yang akan datang.

Perbedaan prospek pengembangan pariwisata dan prospek keramba jaring apung menjadi kendala bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam dalam melakukan upaya peningkatan pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung. Hal itu disebabkan karena bagi petani keramba jaring apung dalam pengembangan pariwisata hanya saja menguntungkan sebagian pihak saja namun untuk pengembangan keramba jaring apung akan menguntungkan para petani keramba sehingga perekonomian mereka meningkat karena usaha tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Rosva selaku Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam sebagai berikut:

“..keadaan ini tidak menyurutkan kemauan masyarakat untuk tetap berkeramba di danau tersebut karena perekonomian masyarakat dilihat-

lihat saat berkembangnya keramba jaring apung mulai meningkat, masyarakat masih tetap saja melakukan peningkatan jumlah keramba jaring apung setiap saatnya”.

Namun dalam konteks ilmiah pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Salim, 1993:4). Dari aktivitas budidaya keramba jaring apung tersebut tidak termasuk kedalam aktivitas yang menciptakan pembangunan berkelanjutan bagi daerah Kabupaten Agam karena menurut Kementrian Lingkungan Hidup pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu :

- (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*.
- (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya.
- (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Dengan demikian walaupun orientasi aktivitas keramba jaring apung kepada peningkatan ekonomi, jika dikaitkan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tidak menjadi salah satu aktivitas yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal itu disebabkan karena aktivitas tersebut tidak sesuai dengan kriteria tolok ukur keberlanjutan menurut Kementrian Lingkungan Hidup. Maka dari itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan selalu mengupayakan peningkatan pariwisata agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana.

3.2.2. Perbedaan Pandangan Antara Masyarakat dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam.

Kendala selanjutnya yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung adalah perbedaan pandangan yang ada pada masyarakat dan pada kedua instansi pemerintah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab dalam pengembangan potensi pariwisata serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab dalam bidang budidaya ikan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rosva Desvira selaku Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

“Beda kepentingan tadi lebih kepada perbedaan dalam mencapai tujuan. Kalau di budidaya yaa kami tujuan untuk meningkatkan produktivitas sedangkan pariwisata lebih ke pelestarian objek wisata, jumlah kunjungan dan pelestarian lingkungan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Elfis Piliang selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

“Telah banyak upaya yang dilakukan mulai dari mensosialisasikan aturan yang ada tentang bagaimana pengelolaan danau serta berapa kapasitas daya tampung yang hanya diperbolehkan untuk KJA tapi yaa itulah pandangan masyarakat memang berbeda-beda ada yang menerima ada yang tidak akan himbauan ini. Kami tidak bisa pula memberikan aturan untuk menghilangkan KJA sepenuhnya. Sama-sama dilihatkan KJA itu merupakan mata pencaharian utama sebahagian masyarakat di salangka danau, jika KJA dihilangkan ya lapangan kerja hilang, mata pencaharian hilang dan imbasnya ke perekonomian masyarakat. Selaku pihak pemerintah yang mengawasi kami telah memberikan himbauan kepada petani KJA untuk mengurangi jumlah KJA karena keadaan air yang menurun kualitasnya”. Kendalanya tadi yaa berupa sulitnya memberikan

kesadaran akan dampak yang ditimbulkan ketika kita selalu mengeksploitasi danau secara terus menerus dengan terus menambah jumlah KJA di Danau Maninjau. Serta sulitnya untuk menyamakan pandangan akan pelestarian danau kepada tiap-tiap petani KJA karena perbedaan pengetahuan yang ada pada masyarakat atau petani KJA”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Fitriati selaku Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata sebagai berikut:

“Perbedaan kepentingan yang terjadi dalam dua instansi serta perbedaan pola pikir yang ada pada masyarakat kita tentang pelestarian lingkungan dengan kegiatan pariwisata walaupun prospeknya jauh dibandingkan KJA”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah perbedaan pandangan masyarakat tentang pelestarian lingkungan yang diciptakan lewat kegiatan pariwisata sedangkan kegiatan keramba jaring apung akan menimbulkan pencemaran serta lingkungan tidak terlestarikan dan adanya perbedaan pandangan kedua instansi dalam mencapai tujuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tujuannya lebih kedalam pelestarian lingkungan disamping tujuan pendapatan, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan tujuannya untuk meningkatkan produktivitas yang berorientasi pada pendapatan masyarakat sedangkan lingkungan tidak terlestarikan karena pencemaran akibat limbah keramba jaring apung tersebut.

Ketika para petani keramba jaring apung diarahkan untuk mengurangi jumlah keramba yang mereka miliki untuk mengatasi pencemaran lingkungan mereka tidak menghiraukan arahan tersebut, karena pandangan mereka jika jumlah dan aktivitas keramba jaring apung dikurangi maka akan berdampak pada penurunan pendapatan mereka dan mereka akan kehilangan mata pencaharian.

Alasan ekonomi dan sosial inilah yang menjadi alasan paling ampuh bagi masyarakat untuk tetap melanjutkan kegiatan tersebut (Farissa, 2015:89).

Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengurangi jumlah keramba ini sangat penting untuk terciptanya zonasi yang telah direncanakan dan akan terealisasi dengan adanya dukungan dari semua pihak. Dinas kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak yang bertanggung jawab untuk pengembangan pariwisata akan selalu berupaya dan akan menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.

Untuk meminimalisir dampak dan perbedaan pandangan dari masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pihak terkait yang bertanggung jawab untuk memonitoring keberadaan keramba jaring apung dan pariwisata telah melakukan suatu upaya berupa memberdayakan kelompok-kelompok yang ada disekitar Danau Maninjau. Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari kelompok petani keramba jaring apung dan kelompok usaha oleh-oleh khas Danau Maninjau. Hasil budidaya yang mereka lakukan akan diolah dan dipasarkan, outlet pemasaran oleh-oleh khas Maninjau yang dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ini berada di kenagarian muko-muko tepatnya di objek wisata PLTA. Dengan demikian upaya untuk mengurangi jumlah keramba jaring apung dapat dilakukan secara bertahap dan masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prospek pengembangan pariwisata Danau Maninjau disaat berkembangnya keramba jaring apung adalah berdasarkan kesadaran yang dimiliki oleh petani keramba jaring apung, pemilik usaha jasa pariwisata, serta Pemerintah Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Dinas Kelautan dan Perikanan) bertindak sebagai agen dalam menerapkan struktur yang telah ada yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Danau Maninjau sehingga dapat meminimalisir jumlah keramba jaring apung yang telah sesuai dengan aturan yang telah ada serta dapat meningkatkan kembali potensi pariwisata Danau Maninjau disaat berkembangnya keramba jaring apung.

Ada tiga struktur yang dijelaskan oleh Gidden dalam praktik sosial yaitu:

1. Struktur signifikansi, dalam pengembangan pariwisata Danau Maninjau disaat berkembangnya keramba jaring apung saling menciptakan sinergi antara petani keramba jaring apung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta pemilik usaha jasa pariwisata dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam. Dinas Kelautan dan Perikanan selalu mengoptimalkan pengurangan jumlah petak keramba jaring apung dan

terus mengupayakan terbentuknya keramba jaring apung yang ramah lingkungan sehingga apa yang menjadi tujuan pembagunan dalam keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terlaksana. Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara terus menerus memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok yang ada sehingga dengan adanya pembinaan tersebut usaha jasa pariwisata dan potensi pariwisata Danau Maninjau terus dikembangkan. Disamping memberikan pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku agen yang menjalankan praktik sosial juga terus mempromosikan pariwisata Danau Maninjau lewat event-event serta spanduk dan plang-plang promosi yang di pajang di tempat-tempat umum sertatempat objek wisata.

2. Struktur dominasi merupakan suatu penguasaan dalam melakukan praktik sosial, baik dalam penguasaan barang, orang, maupun jasa dan tujuan-tujuan tertentu. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau keterkaitan dalam pencapaian tujuan memiliki kekuasaan yang sesuai dengan tujuan dan peran masing-masing dalam keberlangsungan pengembangan potensi pariwisata Danau Maninjau. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai induk dalam penyelenggaraan dan pengawasan pariwisata. Instansi pemerintah ini mempunyai aturan yang kuat dalam memenuhi tujuan. Pemenuhan tujuan itu terlihat dari upaya yang dilakukan berupa pembinaan, promosi dan pembentukan zonasi dalam pemanfaatan Danau Maninjau sehingga terjadi keseimbangan dalam melakukan aktivitas keramba jaring apung dan pariwisata. Dengan adanya keseimbangan

dalam pemanfaatan potensi Danau Maninjau ini akan memberikan suatu kontribusi dalam pendapatan daerah Kabupaten Agam.

3. Struktur legitimasi, dalam struktur ini terlihat bahwa adanya perbedaan pemanfaatan potensi Danau Maninjau baik itu pemanfaatan dalam aktivitas keramba jaring apung dan pariwisata, menciptakan suatu struktur yang kuat dan tegas agar menciptakan keseimbangan. Petani keramba jaring apung menjadi agen yang akan menciptakan keseimbangan dalam pengurangan jumlah keramba jaring apung sedangkan pemilik usaha jasa pariwisata menjadi agen untuk berhubungan langsung dengan wisatawan serta menjadi agen dalam mengembangkan potensi pariwisata Danau Maninjau.

Dengan adanya struktur signifikansi, dominasi, legitimasi menjadi sebuah praktik sosial dalam melakukan pengembangan pariwisata Danau Maninjau disaat berkembangnya keramba jaring apung.

4.2 Saran

Berdasarkan adanya upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring apung serta ada pula kendala yang dihadapi Dinas kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan upaya tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Masyarakat dan pihak terkait dapat membantu secara maksimal upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan potensi pariwisata Danau Maninjau saat berkembangnya keramba jaring

apung sehingga pencemaran dapat diatasi dan pelestarian Danau Maninjau juga tercipta dengan adanya kegiatan pariwisata.

2. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat “duduk bersama” dalam mengatasi kondisi Danau Maninjau saat ini, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan atas keseimbangan antara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dapat terwujud.

